

POLICY BRIEF

Studi Efektifitas dan Peranan Strategi Koperasi dalam Mendorong Pertumbuhan dan Kemandirian UMKM Era Digitalisasi Sosial di Kota Makassar

Tim Peneliti:

Kaharuddin S.Pd.,M.Pd.,Ph.D

Dr. Jaelani, S.Pd., M.Pd

Suharmiah S, S.Pd., M.Pd

Muhammad Astrianto Setiadi, S.Pd., M.Pd

Ringkasan Eksekutif

A silhouette of a person standing on a hill, holding a large, glowing yellow orb above their head. The background is a warm, orange sunset sky with a dark silhouette of a city skyline in the distance.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara mendalam efektivitas dan peranan strategis koperasi sebagai agent of change dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, khususnya di tengah gelombang besar digitalisasi sosial. Hasil utama menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh koperasi, terutama yang berfokus pada inkubasi digital (pelatihan pemasaran online, literasi keuangan digital, dan pemanfaatan e-commerce) serta penguatan modal sosial (jejaring anggota, kemitraan strategis, dan berbagi sumber daya), memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi dan jangkauan pasar UMKM.

Peran kunci koperasi tidak hanya terbatas pada fungsi tradisional penyediaan pinjaman, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat ekosistem kolaboratif yang memfasilitasi adaptasi teknologi dan mitigasi risiko persaingan dalam lanskap bisnis yang berubah cepat.

Kemandirian UMKM, yang diukur dari kemampuan inovasi produk, branding digital, dan resiliensi finansial, terbukti meningkat secara substansial pada UMKM yang aktif terlibat dalam program strategis koperasi. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak, koperasi di Makassar perlu mengintegrasikan platform digital yang terpadu yang memungkinkan layanan anggota yang efisien dan real-time, serta fokus pada pengembangan kapasitas kepemimpinan digital dalam struktur manajemen koperasi itu sendiri. Rekomendasi strategis utama adalah mendorong kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar, lembaga keuangan, dan koperasi untuk menciptakan kebijakan insentif yang mendukung investasi koperasi dalam teknologi dan pelatihan digital bagi anggotanya, guna memastikan UMKM tetap kompetitif dan mandiri dalam era ekonomi digital.

Pendahuluan



Koperasi secara fungsional menurut Alfitrah, N. A., & Perkasa, R. D. (2023), memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendorong, menumbuhkan dan mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Secara konseptual, koperasi terbagung dengan tujuan mewujudkan demokrasi kehidupan ekonomi dengan prinsip demokratis kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Arena sosial koperasi tidak hanya bermain sebagai usaha yang dikelola secara kekeluargaan dan kurang profesional, akan tetapi koperasi dituntut secara maksimal untuk mengelola unit-unit usaha dengan baik sehingga koperasi secara fungsional betul-betul dapat menumbuhkan perekonomian rakyat seperti UMKM. Hasil penelitian Fatimah, F., & Darna, D. (2011) menemukan bahwa terdapat stigma negatif dari masyarakat yang menimbulkan kurangnya kepercayaan dari pelaku UMKM terhadap koperasi, ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berkoperasi. Rendahnya pemahaman tersebut juga disebabkan karena faktor pendidikan dan faktor waktu yang cenderung dihabiskan mengurus bisnis usaha mereka daripada terlibat pada organisasi koperasi. Selain dari itu, masalah bunga pinjaman di sektor UMKM masih dirasakan sangat tinggi. Dari sisi citra koperasi menurut Fatimah, F., & Darna, D. (2011) citra koperasi sudah tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya dinilai memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi karena koperasi dari banyak pandangan diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidakjelasan, tidak profesional, justru memperkuat kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan)

UMKM pada level pemerintah daerah dari aspek kebijakan dan bantuan modal menurut Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019) belum mewujudkan iklim yang sempurna untuk UMKM, hal tersebut terlihat pada aspek strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial yang cenderung pertumbuhan UMKM lambat. Selain dari itu, hasil penelitian Nurhalita, S. (2022) penyediaan dana dan penyalurannya dari pemerintah daerah dianggap masih terlalu minim untuk mendukung fasilitas bagi UKM. Selanjutnya proses pemberdayaan masih dinilai terbatas karena tidak bisa menjangkau semua pelaku UMKM, sehingga banyak pemilik usaha yang tidak merasakan pemberdayaan dari dinas koperasi untuk UMKM.

Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM



Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM

Monitoring dan Evaluasi

Melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah.

Penguatan Kapasitas Koperasi

Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi.

Koordinasi Antar Lembaga

Memastikan kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga.

Peningkatan Kesadaran UMKM

Meningkatkan pemahaman UMKM tentang manfaat koperasi.

Dukungan Pemerintah Daerah

Menyediakan kebijakan dan dukungan keuangan untuk koperasi dan UMKM.



Deskripsi Masalah

Koperasi di Kota Makassar memiliki mandat sentral untuk menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) anggotanya. Namun, peran ideal ini sering terhambat oleh serangkaian permasalahan internal yang mendasar pada koperasi itu sendiri. Permasalahan kunci meliputi lemahnya tata kelola dan manajemen organisasi (seperti kurangnya transparansi, inefisiensi operasional, dan konflik kepentingan), keterbatasan inovasi produk dan layanan (yang masih didominasi simpan pinjam konvensional), serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dalam mengadopsi praktik bisnis modern dan teknologi. Keterbatasan internal ini secara langsung mengurangi kemampuan koperasi untuk menyediakan value proposition yang relevan dan strategis, seperti pendampingan bisnis yang berkualitas, akses pasar yang terintegrasi, atau solusi pembiayaan yang fleksibel, sehingga dampaknya terhadap percepatan pertumbuhan UMKM menjadi minimal.

Permasalahan dalam pengembangan UMKM yang diklasifikasikan diantaranya, permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan produk, serta tidak keseluruhan pelaku usaha yang familiar dengan pemasaran menggunakan media digital. Permasalahan lain UMKM menurut Pitono, A. (2024) terletak pada digitisasi pemasaran yang belum merata. Berdasarkan temuan terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhinya, seperti pelaku UMKM belum mandiri dalam pemasaran produk secara digital disebabkan masih ketergantungan pada proses konvensional, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kekurangan dalam perencanaan strategis program.



Rekomendasi Kebijakan



1. Pemerintah mesti membuat regulasi kebijakan dengan menjadikan koperasi sebagai **mitra strategis yang tangguh** untuk mendorong koperasi sebagai jalan dalam memperkuat pertumbuhan UMKM di Kota Makassar. Setelah koperasi menjadi mitra pemerintah, pemerintah mesti berfokus pada **penguatan tata kelola kelembagaan dan profesionalisme koperasi** guna mewujudkan koperasi yang sukses, UMKM berdaya saing dan Kota Makassar yang Unggul. Melalui kolaborasi pemerintah, koperasi dan UMKM sebagai siklus tiga pilar akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
2. Peraturan Walikota/SK yang menetapkan Koperasi sebagai mitra strategis *hanya* jika telah lulus Audit Kesehatan Keuangan (AKK) tahunan dan memiliki skor tata kelola di atas standar minimum (Koperasi Sehat/Cukup Sehat).
3. **Fasilitasi RAT Digital:** Menyediakan infrastruktur atau *platform* digital gratis/bersubsidi bagi Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara *online* demi efisiensi dan peningkatan partisipasi anggota.
4. **Skema Dana Bergulir Bersama (DBB) Berbasis Risiko:** Mengalokasikan dana APBD untuk skema DBB yang disalurkan melalui Koperasi Terakreditasi, dengan syarat Koperasi menyalurkan pinjaman inklusif (tanpa agunan di bawah nilai tertentu) dan menanggung sebagian kecil risiko (*first loss*) untuk mendorong prinsip kehati-hatian.
5. **Program Pelatihan Tiga Literasi Wajib (3L):** Mewajibkan Koperasi yang menerima dana DBB untuk menyertakan program pelatihan terintegrasi (Literasi Keuangan, Literasi Manajemen Usaha, dan Literasi Digital) bagi UMKM penerima modal.
6. **Program Standarisasi Produk Terintegrasi:** Menunjuk Koperasi sebagai fasilitator resmi yang bertugas mendampingi UMKM anggota dalam proses pengurusan sertifikasi dasar mutu (*PIRT, Halal, NIB*) dengan subsidi biaya dari Pemkot.
7. **Bantuan Infrastruktur Teknologi Koperasi:** Memberikan *grant* (hibah) atau pinjaman lunak kepada Koperasi untuk berinvestasi pada infrastruktur digital yang mendukung promosi dan penjualan UMKM (misalnya, *server data, platform e-commerce* bersama, studio mini foto produk).
8. **Sistem Basis Data UMKM Terintegrasi Koperasi:** Mewajibkan Koperasi yang bermitra untuk mengelola dan melaporkan data profil, kinerja, dan perkembangan UMKM anggotanya ke dalam **Sistem Informasi Koperasi dan UMKM (SIKU-M) Pemkot** secara berkala (monitoring).

Kesimpulan



Keseluruhan rekomendasi kebijakan ini berfokus pada transformasi Koperasi dari sekadar lembaga simpan pinjam konvensional menjadi Mitra Strategis Pemerintah yang tangguh dan motor penggerak utama pertumbuhan serta kemandirian UMKM di Kota Makassar. Untuk mewujudkan hal ini, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan internal koperasi melalui penegakan tata kelola kelembagaan dan profesionalisme yang ketat, di mana pemerintah wajib menetapkan standar kompetensi manajerial dan audit kesehatan finansial. Selain itu, kebijakan harus berorientasi pada penguatan modal anggaran internal koperasi untuk memperluas skema pembiayaan inklusif bagi UMKM, yang diintegrasikan dengan program pelatihan tiga literasi (keuangan, manajemen, dan digital). Integrasi ini bertujuan untuk memastikan UMKM tidak hanya mendapat modal, tetapi juga memiliki kapasitas SDM wirausaha yang berkualitas, berani, mandiri, serta mampu mengelola usahanya secara profesional dan adaptif terhadap teknologi.

Penguatan peran Koperasi juga diarahkan pada aspek infrastruktur, standarisasi produk, dan akses pasar digital untuk menjamin eksistensi berkelanjutan UMKM. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang menjadikan Koperasi sebagai holding sinergi dan fasilitator pembangunan ekosistem kolaboratif (seperti co-working space atau sentra berbasis UMKM). Koperasi juga harus didorong untuk memperkuat infrastruktur teknologi guna memfasilitasi promosi dan penjualan UMKM berbasis digital. Terakhir, keberhasilan seluruh kebijakan ini dijamin melalui penguatan basis data UMKM serta sistem monitoring dan evaluasi berkala yang dikelola Koperasi, yang memungkinkan intervensi pemerintah menjadi real-time dan tepat sasaran, sehingga tercipta siklus tiga pilar yang kuat antara Pemerintah, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan Kota Makassar yang unggul dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

Alfitrah, N. A., & Perkasa, R. D. (2023). Peranan Koperasi dalam Menumbuhkan Potensi Perekonomian Umat Secara Deskriptif.

Fatimah, F., & Darna, D. (2011). Peranan koperasi dalam mendukung permodalan usaha kecil dan mikro (UKM). *Ekonomi & Bisnis*, 10(2).

Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Nurhalita, S. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84-90.

